

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Pemurus Dalam, peran dan tanggung jawab Ketua Rukun Tetangga (RT) harusnya mengorganisir dan memfasilitasi kegiatan sosial serta kemasyarakatan, seperti gotong-royong, pertemuan warga, dan penyuluhan terkait kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Ketua RT juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dari pemerintah setempat kepada warga, mengumpulkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Selain itu, Ketua RT berperan dalam menjaga keamanan lingkungan dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, mengelola dana dan anggaran yang diterima untuk kegiatan RT, serta memastikan partisipasi aktif warga dalam setiap kegiatan yang diadakan. bahwa sistem pelayanan dari Ketua RT di Pemurus Dalam saat ini masih memerlukan banyak perbaikan. Komunikasi yang kurang efektif dan minimnya keterlibatan langsung dengan warga menjadi hambatan utama dalam menyampaikan informasi dan menjalankan kegiatan RT. Transparansi yang kurang dalam alokasi dana dan perencanaan kegiatan juga mengurangi partisipasi dan pemahaman warga terhadap program RT. Selain itu, kinerja Ketua RT dianggap kurang memuaskan karena inisiatif yang minim dalam mengatasi masalah masyarakat serta keterbatasan sumber daya dan dukungan yang

menghambat efektivitas pelayanan. Untuk meningkatkan peran RT, diperlukan upaya peningkatan komunikasi, transparansi, pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab, serta pelibatan aktif anggota RT dan warga dalam setiap program yang dijalankan.

1. Hal ini dibuktikan dengan analisis terhadap data yang disajikan, Ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat masyarakat. Tanggung jawabnya mencakup memastikan pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh, meningkatkan representasi yang adil melalui proses pemilihan yang transparan, serta memastikan pelaporan kegiatan RT bersifat transparan dengan menggunakan sarana informasi yang efektif seperti papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks demokratisasi, Ketua RT juga diharapkan berperan aktif dalam memastikan proses pemilihan yang melibatkan musyawarah, menegakkan keadilan, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapnya.

2. Namun, terdapat beberapa faktor kendala yang dapat melemahkan tanggung jawab Ketua RT. Kendala tersebut melibatkan kurangnya pemahaman tentang SOP, melalaikan tugas pelayanan kepada warga, kesulitan dalam mendata masyarakat kurang mampu, ketidaktransparan dalam pelaporan kegiatan RT, dan potensi tidak demokratisan dalam proses pemilihan. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini termasuk penyediaan pelatihan dan sosialisasi terkait SOP, memperkuat mekanisme pendataan, melakukan perbaikan pada transparansi pelaporan, dan

mendorong proses pemilihan yang melibatkan musyawarah. Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan Ketua RT di kelurahan pamurus dalam kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan pada bab penutup ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan

Pemerintah perlu mengefektifkan dukungan terhadap Rukun Tetangga (RT) dengan menyusun program pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang menyeluruh terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) agar Ketua RT dan anggotanya dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan kegiatan RT, termasuk memastikan papan pengumuman berfungsi efektif. Proses pemilihan Ketua RT juga perlu diperbaiki agar lebih demokratis, dengan memberikan panduan yang jelas dan mengawasi setiap tahap pemilihan. Menyediakan platform online untuk pelaporan efisien juga dapat menjadi inovasi yang memudahkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

2. Kepada Ketua RT

Ketua RT memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Ketua RT perlu aktif terlibat dalam program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, khususnya terkait SOP dan tugas mereka. Selain itu, mereka sebaiknya memainkan peran utama dalam mekanisme pendataan masyarakat kurang mampu dengan memotivasi anggota RT lainnya, berkoordinasi dengan dinas sosial, ikut andil dalam pelayanan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RT harus menjaga transparansi dalam pelaporan kegiatan RT, memberikan informasi secara jujur, dan memastikan papan pengumuman berfungsi efektif. Fasilitasi proses pemilihan yang adil dan demokratis juga menjadi tanggung jawab mereka, untuk memastikan keadilan dalam kepemimpinan.

3. Kepada Warga

Partisipasi aktif warga sangat penting untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dari RT. Warga sebaiknya aktif dalam musyawarah pemilihan Ketua RT, menyuarakan aspirasi mereka, dan memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil. Selain itu, warga diharapkan berpartisipasi dalam pendataan masyarakat kurang mampu dengan memberikan informasi yang akurat. Penggunaan platform online yang mungkin disediakan oleh pemerintah juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Dengan mengakses informasi dan memberikan umpan balik melalui platform tersebut, warga dapat berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan yang diberikan oleh RT.